



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta, No. Telp (0474) 321423, Fax (0474) 321423
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2016 – 2021

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08);
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3);
 26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021;
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA : Keputusan kepala dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 April 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapai penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan SKPD diwajibkan menyusun dokumen dimaksud diantaranya adalah RENSTRA SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

pelayanan publik SKPD dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. SKPD bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan RENJA SKPD;
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD;
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum RENSTRA SKPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang arah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategi atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

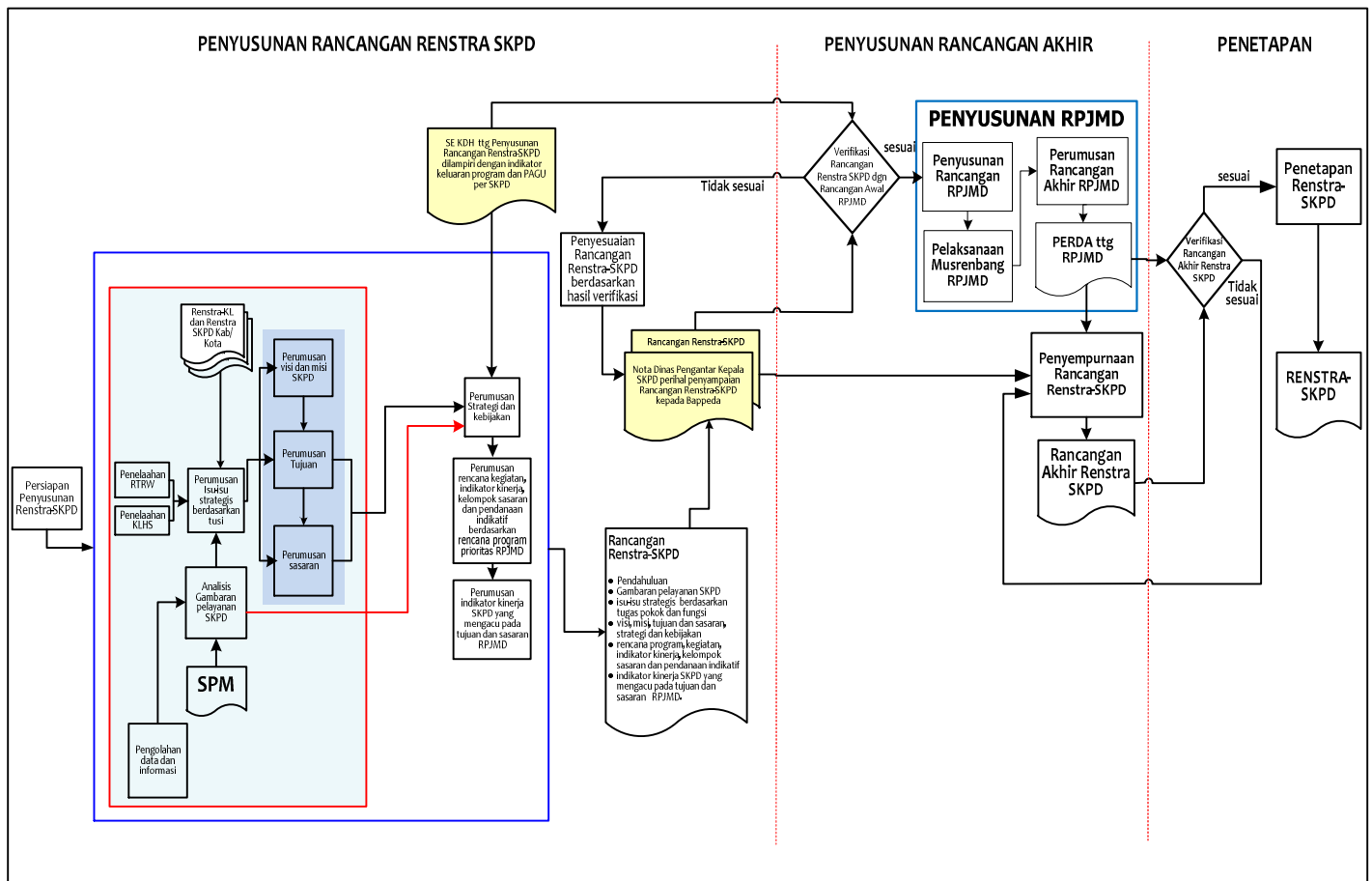
Dalam pelaksanaannya, RENSTRA ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stakeholder yang terkait dengan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan

maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini karena pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan Rencana Strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis SKPD harus bersinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur diharapkan :

1. Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
2. Dapat memberikan arah terhadap perkembangan daerah dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dengan demikian akan tumbuh terbangun “sense of ownership” dari rencana strategis tersebut;
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis dan permasalahan prioritas di sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
5. Dapat merumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan;
6. Dapat menghasilkan acuan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten

Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 2021.

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Disdagkop-UKM, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholders* sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi dari Disdagkop-UKM Kabupaten Luwu Timur.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan pembangunan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP);
4. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, memberikan arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan penganggaran yang meliputi urusan perdagangan, koperasi dan umkm di Luwu Timur. Adapun sistematika penulisan RENSTRA adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas SKPD
	2.2. Sumber Daya SKPD
	2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Propinsi

	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan
	4.2.	Sasaran
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1.	Program
	6.2.	Kegiatan
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
BAB VIII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan tugas: ***"melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan"***. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;

- e. Bidang UMKM;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perdagangan dengan tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;

c. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perdagangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan usaha dan sarana prasarana distribusi perdagangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama perdagangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Koperasi dengan dua Seksi yaitu :
- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 - b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.

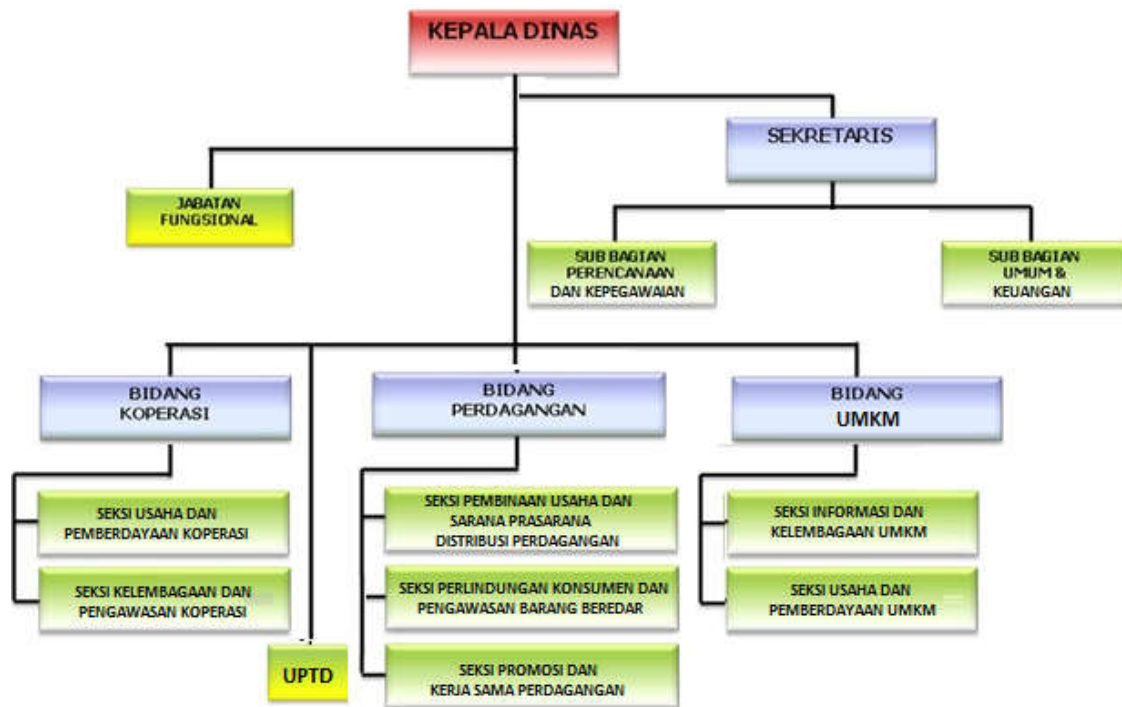
Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
3. Bidang UMKM dengan dua seksi, yaitu :
- a. Seksi Informasi dan Kelembagaan UMKM
 - b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan UMKM

Tugas Bidang UMKM adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang UMKM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Sedangkan fungsinya adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan UMKM;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan UMKM; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

Pendidikan							
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
ASN (Aparatur Sipil Negara)	5	11	3	5	-	-	24
Upah Jasa	-	1	-	4	2	-	7
Jumlah							31

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang (3,13%), S1 sebanyak 11 orang (53,13%), D3 sebanyak 3 orang (12,5%), SLTA sebanyak 5 orang (28,13%), SLTP sebanyak 2 orang (3,13%) dan SD sebanyak 0 orang (0%).

Komposisi pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan
ASN (Aparatur Sipil Negara)	10	15
Upah Jasa	5	2
Jumlah	15	17

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa sesuai jenis kelamin, laki-laki sebanyak 15 orang (46,88%), perempuan sebanyak 17 orang (53,13%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan/ruang adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.3 berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2016

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV / e	-
2.	IV / d	-
3	IV / c	1
4.	IV / b	1
5.	IV / a	2

	Jumlah Golongan IV	4
1.	III / d	2
2.	III / c	5
3.	III / b	3
4.	III / a	3
	Jumlah Golongan III	13
1.	II / d	4
2.	II / c	1
3.	II / b	3
4.	II / a	-
	Jumlah Golongan II	8

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk golongan IV sebanyak 4 orang (16%), golongan III sebanyak 13 orang (52%), golongan II sebanyak 8 orang (32%).

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dengan jabatan struktural, fungsional, fungsional umum adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.4 berikut

Tabel 2.2.4

Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2016

Jabatan						
	Struktural				Fungsional	Fungsional Umum
	Eselon					
	IIa	IIIa	IIIb	IVa		
ASN (Aparatur Sipil Negara)	1	1	3	9	-	11
Jumlah	1	1	3	9		11

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan struktural sebanyak 14 orang (56%) dan fungsional umum sebanyak 11 orang (44%).

b. Sarana dan Prasarana

Jumlah aset tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 41.090.197.391,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 2.2.5 berikut :

Tabel 2.2.5
Rincian Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Luwu Timur
(Per 31 Desember 2015)

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp)
1.	Tanah	94.449.479,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.656.282.680,00
3.	Gedung dan Bangunan	25.152.373.208,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	295.724.372,00
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.032.352.753,00
6.	Aset Lainnya	536.430.000,00
	Jumlah	41.090.197.391,00

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana pada Tabel 2.2.6 dibawah ini :

Tabel 2.2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Luwu Timur
(Per 31 Desember 2015)

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Tahun Pembelian/Lokasi	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)
A	Bangunan dan Gedung			
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 unit	Tahun 2006, Luas 2791 M2	Baik
	- Bangunan Bengkel Permanen (bengkel industri)	1 unit	Tahun 2008 (bengkel lampia)	Baik
	- Asrama Permanen	1 unit	Tahun 2009 (bengkel lampia)	Baik
	- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1 unit	Tahun 2010 (outlet ussu)	Baik
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Tahun 2011 (Jl. Soekarno Hatta Malili)	Baik
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 unit	Tahun 2014, Luas 1610 M2	Baik
	- Bangunan Gudang Tertutup	1 unit	Tahun 2014 (Mangkutana/SRG)	Baik
	- Konstruksi Pagar	1 unit	Tahun 2014 (bengkel industri lampia)	Baik
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 unit	Tahun 2015 (lanjutan landscaping bengkel industri lampia)	Baik
B	Peralatan dan Mesin			
	Alat Angkutan Kendaraan Roda 4			

- Toyota Innova (Station Wagon)	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Suzuki Cary Pick Up	1 unit	Hibah Tahun 2014	Baik
Alat Angkutan Kendaraan Roda 2			
- Sepeda Motor Honda Win	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
- Sepeda Motor Shougun 125 R	2 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
- Sepeda Motor Suzuki Thunder/EN 125	1 unit	Tahun 2006	Kurang Baik
- Sepeda Motor Suzuki Shougun	1 unit	Tahun 2008	Baik
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
- Alat Ukur Air	1 unit	Tahun 2004	Baik
- Timbangan	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
- Timbangan Cepat Kapasitas 100 kg	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
- Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
- Mesin Potong Rumput	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Mesin Potong Rumput	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Alat Ukur Air	2 unit	Tahun 2014	Baik
- Timbangan Cepat Kapasitas 10 Kg	1 unit	Tahun 2014	Baik
- Hgro Meter	1 unit	Tahun 2014	Baik
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya			
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2003	Rusak Berat
- Lemari Kerja	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
- Kursi Plastik	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
- Mesin Ketik Standar (14-16)	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat

- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2004	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2004	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2004	Kurang Baik
- Mesin Ketik Brother (14-16)	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Mesin Ketik Manual Longewagen	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2005	Kurang Baik
- Display	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 unit	Tahun 2005	Baik
- Lampu Hias	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Note Book	2 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Printer	2 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2005	Baik
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
- AC unit	1 unit	Tahun 2006	Rusak Berat
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2006	Baik
- Jaring	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2007	Baik
- White Board	1 unit	Tahun 2007	Baik
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2007	Baik
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2007	Baik
- Server	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2007	Baik
- Jaring	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2008	Baik
- White Board	2 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1 unit	Tahun 2008	Kurang Baik
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2008	Baik
- Sofa	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat

- Kompor Gas	1 unit	Tahun 2008	Baik
- Rak Piring	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2008	Baik
- Note Book	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Server	1 unit	Tahun 2008	Kurang Baik
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2008	Rusak Berat
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2008	Baik
- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Brankas	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2009	Baik
- Papan Pengumuman	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2009	Kurang Baik
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2009	Baik
- Sofa	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Lemari Es	1 unit	Tahun 2009	Baik
- AC Unit	1 unit	Tahun 2009	Baik
- Dispenser	1 unit	Tahun 2009	Baik
- Note Book	1 unit	Tahun 2009	Baik
- Printer	2 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- UPS	1 unit	Tahun 2009	Kurang Baik
- Harddisk External	1 unit	Tahun 2009	Kurang Baik
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2009	Rusak Berat
- Gerobak Dorong	1 unit	Tahun 2010	Kurang Baik
- Filling Besi/Metal	1 unit	Tahun 2010	Baik
- AC Unit	1 unit	Tahun 2010	Baik
- Genset	1 unit	Tahun 2010	Baik
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2010	Baik
- Printer	1 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2010	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2010	Rusak Berat
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3 unit	Tahun 2010	Baik
- Printer	1 unit	Tahun 2010	Baik
- Mesin Absen (Time Recorder)	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Lemari Besi	2 unit	Tahun 2011	Baik
- Lemari Kaca	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Meja Rapat	1 unit	Tahun 2011	Baik

- Kursi Rapat	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Bangku Tunggu	2 unit	Tahun 2011	Baik
- Sofa	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Gorden	2 unit	Tahun 2011	Baik
- Lemari Es	1 unit	Tahun 2011	Baik
- AC Unit	5 unit	Tahun 2011	Baik
- Televisi	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Komputer PC	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Note Book	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
- Note Book	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Printer	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Meja Kerja	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit	Tahun 2011	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
- Printer	1 unit	Tahun 2011	Rusak Berat
- Printer	1 unit	Tahun 2011	Baik
- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Lemari Besi	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Lemari Kaca	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Meja Makan	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
- Meja Makan	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Kursi Biasa	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
- Kursi Biasa	1 unit	Tahun 2012	Baik
- AC Unit	2 unit	Tahun 2012	Baik
- Laptop	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Laptop	1 unit	Tahun 2012	Rusak Berat
- Note Book	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Printer	1 unit	Tahun 2012	Baik
- Daun Pintu Almunium	1 unit	Tahun 2013	Baik
- Filling Besi/Metal	1 unit	Tahun 2014	Baik

	- Brankas	1 unit	Tahun 2014	Baik
	- Genset	1 unit	Tahun 2014	Baik
	- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2014	Rusak
	- Kursi Putar	2 unit	Tahun 2014	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	1 unit	Tahun 2014	Baik
	- NoteBook	1 unit	Tahun 2014	Baik
	- Printer	1 unit	Tahun 2014	Baik
	- Papan Pengumuman	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Lemari Kayu	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Meja Kayu/Rotan	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Kursi Putar	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Kursi Biasa	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Tempat Tidur Busa (Springbad)	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Dinding/Sekat Besi	1 unit	Tahun 2015	Baik
	- Laptop	2 unit	Tahun 2015	Baik
	- Printer	1 unit	Tahun 2015	Baik
	Alat Studio dan Komunikasi			
	- Facsimile	1 unit	Tahun 2004	Rusak Berat
	- Proyektor Attachment +	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
	- Peralatan Studio Visual Lainnya	1 unit	Tahun 2005	Rusak Berat
	- Wireless	1 unit	Tahun 2006	Baik
	- Camera Film	1 unit	Tahun 2007	Rusak Berat
	- Proyektor Attachment +	1 unit	Tahun 2007	Baik
	- Camera Film	1 unit	Tahun 2012	Baik
	Alat Keamanan			
	- Alat Pemadam Kebakaran	1 unit	Tahun 2014	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu

Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat bidang pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat pada dasarnya adalah memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Diantaranya melalui :

1. Sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
3. Melakukan penilaian kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala;
4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian Koperasi Berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan;
5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, legitimasi, dan pembubaran koperasi;
6. Fasilitasi pembiayaan dan pengendalian kredit program dan dana bergulir;
7. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis dana manajemen bagi KUMKM;
8. Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi baik tingkat lokal, regional dan internasional;
9. Pengembangan pola-pola kemitraan;
10. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
11. Pengembangan sentra-sentra industri mengarah kepada klaster;
12. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG);
13. Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan meracik dan menjual minuman beralkohol;

14. Peningkatan kegiatan ekspor sebagai upaya pengembangan perdagangan luar negeri, diantaranya adalah:
 - Identifikasi produk potensi ekspor untuk diikutsertakan pada promosi dagang/pameran;
 - Pemberian informasi mengenai prosedur dan tata cara ekspor/impor;
 - Pemberian pelayanan administrasi dokumen ekspor/impor
15. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM;
16. Pemantauan dan pencatatan perkembangan harga eceran bahan pokok dan barang strategis 1 (satu) minggu sekali pada hari senin. Pemantauan dilakukan di pasar-pasar tradisional kecamatan;
17. Pengawasan barang yang beredar dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;
18. Pengawasan penggunaan alat UTTP dan pendampingan pelaksanaan siding tera ulang yang dilaksanakan oleh petugas kemetrolagian setiap tahun pada bulan November;
19. Pengawasan barang yang beredar yang ada dipasaran dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan;
20. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di 11 (sebelas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur pada bulan Ramadhan;
21. Penyelesaian pengaduan konsumen;

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2015, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2011-2015

No	Program/Kegiatan				
	2011	2012	2013	2014	2015
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
II	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1	Peningkatan Kerjasama Dibidang HAKI	Peningkatan Kerjasama Dibidang HAKI		Peningkatan Kerjasama Dibidang HAKI	Peningkatan Kerjasama Dibidang HAKI
2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan				
III	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
IV	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi			

2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi			
V	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen
2	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
3	Operasionalisasi Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Operasionalisasi Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah		Operasionalisasi Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Operasionalisasi Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
VI	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional
2	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5					Bimbingan Teknis Operasionalisasi dan Fungsionalisasi Gudang Dalam Kerangka Sistem Resi Gudang (SRG)
VII	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	
2	Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri			Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
VIII	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri			
2	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri				
IX		Program Penataan Struktur Industri		Program Penataan Struktur Industri	
1		Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri		Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	
2				Pengembangan Kawasan Home Industri Unggulan (KHILAN)	
X	Program Pengembangan Sentra-sentra	Program Pengembangan Sentra-sentra	Program Pengembangan Sentra-sentra	Program Pengembangan Sentra-sentra	Program Pengembangan Sentra-sentra

	Industri Potensial	Industri Potensial	Industri Potensial	Industri Potensial	Industri Potensial
1	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

Adapun Kinerja pelayanan SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dalam RPJMD periode sebelumnya. Dari bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian serta Perdagangan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Data Keragaan Koperasi Perjenis Kabupaten Luwu Timur
Sampai Dengan Tahun 2015

No	Koperasi Perjenis/Perkelompok	Aktif (Unit)	Tdk Aktif (Unit)	RAT (Unit)	Anggota (org)		Manajer (org)		Karyawan		Modal Sendiri (Rp.000)	Modal Luar (Rp.000)	Asset (Rp.000)	Volume Usaha (RP.000)	SHU
					Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan					
I	Koperasi Primer														
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	8	9	7	1.404	675	10	-	5	7	513.910	13.307.078	13.820.988	5.078.355	158.550
2	Koperasi Pertanian (Koptan)	28	15	9	1.290	517	15	-	24	12	1.342.426	1.338.046	2.680.472	2.327.161	153.200
3	Koperasi Perikanan (Kop-Mina) Non KUD	8	5	2	392	91	9	1	6	4	237,972	2,363,400	2,601,372	1,325,762	13,056
4	Koperasi Perkebunan (Kopbun) Non KUD	6	9	2	-	381	145	3	10	5	262,675	589,200	851,875	2,267,750	242,735
5	Koperasi Peternakan (Kopnak) Non KUD	2	-	-	60	27	2	-	2	2	32,520	-	32,520	-	-
6	Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)	5	-	3	168	99	4	-	6	6	155,769	545,000	700,769	823,800	48,999
7	Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA)	1	-	-	29	14	-	-	2	3	28,113	200,000	228,113	-	-

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

No	Koperasi Perjenis/Perkelompok	Aktif (Unit)	Tdk Aktif (Unit)	RAT (Unit)	Anggota (org)		Manajer (org)		Karyawan		Modal Sendiri (Rp.000)	Modal Luar (Rp. 000)	Asset (Rp.000)	Volume Usaha (Rp.000)	SHU (Rp.000)
					Laki- laki	Perempu an	Laki- laki	Peremp uan	Laki- laki	Perempua n					
8	Koperasi Pegawai Negeri Indonesia (KPRI)	7	1	6	512	598	2	1	7	8	5,671,700	5,217,780	10,889,480	6,063,535	1,972,500
11	Koperasi Karyawan (KOPKAR) Non Mandiri	5	-	4	1,110	449	5	-	11	15	1,314,241	3,216,853	4,531,094	4,193,755	667,017
12	Koperasi Serba Usaha (KSU)	63	23	23	4,375	1,929	54	1	75	62	1,861,178	6,581,522	8,442,700	16,200,419	684,963
13	Koperasi ABRI/Kepolisian	-	1	1	127	2	1	-	1	-	19,250	-	19,250	250,350	15,875
14	Koperasi Pasar (KOPPAS)	6	3	2	317	193	4	-	4	6	246,935	222,375	469,310	627,120	43,376
15	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	13	1	2	648	689	12	1	58	36	2,262,902	641,593	2,904,495	1,339,323	191,127
16	Koperasi Angkatan Laut (TKBM)	1	1	1	20	9	1	-	2	1	46,387	26,487	72,874	-	-
17	Koperasi Wanita (KOPWAN)	6	-	1	-	271	-	5	-	8	130,730	200,997	331,727	307,214	15,200
18	Koperasi Pemuda	3	1	1	116	56	4	-	7	7	78,870	160,000	238,870	252,300	17,257
19	Koperasi Lainnya	25	2	6	598	416	22	1	28	23	472,660	1,750,366	2,223,026	2,524,535	115,250
20	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	4	-	-	95	56	5	-	4	2	63,325	254,400	304,825	-	-
	Jumlah	191	71	70	11,624	6,236	153	10	252	207	14,741,563	36,615,097	51,343,760	43,581,377	4,338,205

Tabel 2.3.4
Data Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
Sampai Dengan Tahun 2015

No	Kecamatan	Usaha Menengah	Modal	Usaha Kecil	Modal
1	Malili	94	Rp. 277.001.530.000	1500	Rp.136.476.764.000
2	Towuti	56	Rp. 122.776.948.510	652	Rp. 98.648.465.000
3	Nuha	202	Rp. 3.036.859.153.910	1020	Rp.155.737.209.725
4	Wasuponda	32	Rp. 64.857.800.000	451	Rp. 51.446.271.350
5	Angkona	6	Rp. 6.837.700.000	378	Rp. 19.687.000.000
6	Tomoni Timur	5	Rp. 5.720.000.000	516	Rp. 25.765.674.000
7	Kalaena	7	Rp. 6.800.000.000	462	Rp. 27.327.212.000
8	Wotu	9	Rp. 10.904.295.000	714	Rp. 76.720.009.838
9	Mangkutana	22	Rp. 1.047.491.885.196	550	Rp. 40.997.480.400
10	Tomoni	18	Rp. 275.055.779.861	1285	Rp. 91.839.557.950
11	Burau	18	Rp. 30.602.821.257	616	Rp. 43.041.094.777
Jumlah		469	Rp.4.884.907.913.734	8144	Rp.767.686.739.040

Tabel 2.3.5
Daftar Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 – Tahun 2015

No	Tahun	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai BB/BP (Rp.000)
1	2011	Industri Pangan	83	125	315.500		63.000
		Industri Sandang	11	17	15.200		227.360
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	11	56	165.000		819.485
		Industri Logam dan Elektronika	15	28	163.000		353.700
		Industri Kerajinan	50	113	231.350		1.706.324
2	2012	Industri Pangan	60	117	487.000		932.507
		Industri Sandang	13	23	25.000		40.022
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	7	12	73.000		878.535

No	Tahun	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai BB/BP (Rp.000)
		Industri Logam dan Elektronika	11	15	14.750	916.500	348.180
		Industri Kerajinan	47	145	230.950	1.703.400	795.950
3	2013	Industri Pangan	64	102	117.900	1.624.340	1.011.795
		Industri Sandang	11	18	13.515	972.000	316.200
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	21	32	59.000	1.333.500	865.300
		Industri Logam dan Elektronika	14	34	74.000	1.219.800	819.650
		Industri Kerajinan	20	43	672.000	559.200	281.790
4	2014	Industri Pangan	58	80	293.600	2.053.985	1.019.797
		Industri Sandang	24	49	49.000	1.792.200	896.100
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	13	30	59.000	679.000	370.500

No	Tahun	Nama Sentra	Jumlah Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai BB/BP (Rp.000)
		Industri Logam dan Elektronika	11	21	54.000	178.000	82.150
		Industri Kerajinan	30	90	259.000	1.941.400	1.077.225
5	2015	Industri Pangan	52	143	434.450	6.589.680	3.941.290
		Industri Sandang	18	41	63.225	1.078.130	608.930
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	10	17	52.000	2.920.200	1.655.200
		Industri Logam dan Elektronika	7	17	198.000	2.269.200	1.287.000
		Industri Kerajinan	38	84	172.760	2.333.080	1.426.120
		Industri Kulit dan Barang Dari Kulit	1	13	100.000	2.550.000	1.700.000

Tabel 2.3.6
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2010 – 2014

NO	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Industri pengolahan					
	- Dalam Juta Rupiah	241.084,8	278.711,0	317.826,2	383.359,6	466.195,1
	- Persentase	2,04	2,01	2,08	2,31	2,29

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

Tabel 2.3.7
Banyaknya Perusahaan Industri Pengolahan menurut Klasifikasi Industri
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 – 2014

NO.	Klasifikasi Industri	Perusahaan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	16	38	32	58	51
2	Industri Tekstil, Pakaian jadi dan Kulit	45	11	13	9	24
3	Industri Kayu dan barang-Barang dari Kayu termasuk Perabot	137	35	19	4	12
4	Industri Kertas dan Barang-Barang dari Kertas Percetakan	0	0	1	2	-

NO.	Klasifikasi Industri	Perusahaan				
		2010	2011	2012	2013	2014
	dan Penerbitan					
5	Industri Kimia dan Bahan dari Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet dan Plastik	12	17	0	-	-
6	Industri Barang galian Bukan Logam kecuali Minyak Bumi dan Batubara	0	0	0	-	-
7	Industri Logam dasar	0	0	0	-	-
8	Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	83	15	11	13	11
9	Industri Pengolahan Lainnya	25	54	62	42	25
JUMLAH		318	170	138	128	123

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

Tabel 2.3.8
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 – 2014

NO.	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor					
	- dalam Juta Rupiah	325.789,0	366.209,9	418.872,5	454.819,0	475.484,5
	- Persentase	2,75	2,65	2,74	2,74	2,33

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur yang dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2015 dan serapan anggarannya dapat dilihat dalam Tabel 2.3.9 dan Tabel 2.3.10 :

Tabel 2.3.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 s/d Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
1.	Koperasi																		
	Persentase Koperasi Aktif		-		71,03%	71,71%	70,26%	70,29%	70,30%	63,10%	73,87%	72,94%	73,18%	63,33%	88,83 %	103,01 %	103,81 %	104,11 %	90,08 %
	Jumlah Koperasi Yang Berkualitas		11		73	11	11	11	11	73	11	11	11	12	100%	100%	100%	100%	109%
	Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM		-		-	-	-	-	-	19,227	19,638	19,672	19,895	20,118	-	-	-	-	-
	Jumlah BPR/LKM		-		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	Usaha Mikro dan Kecil		-		-	-	-	-	-	94,40%	94,44%	94,41%	94,37%	94,84%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah UMKM Wirausaha Mandiri		11000		8600	600	600	600	600	8600	642	672	615	635	100%	112%	107%	102,5 %	105,3 %
2	Pedagangan																		
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		-		-	-	-	-	-	2,75%	3,01%	3,22%	3,27%	3,14%	-	-	-	-	-
	Ekspor Bersih Perdagangan (USD)		-		203,49 6,60 (M)	190,02 0,30	182,55 1,80	176,29 2,66	-	843,54 9.151,0 1	635,12 8,508,2 5	606,12 7,673,8 1	820,43 5,020,1 4	614,56 8,189,7 0	-	-	-	-	-
	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Formal		-		-	-	-	-	-	75,45%	39,84%	55,40%	25,33%	65,51%	-	-	-	-	-
	Jumlah Infrastruktur Perdagangan Baru		3		7	7	7	4	3	3	8	11	3	6	42,85 %	114,2 8%	157,1 4%	75%	200%
3	Perindustrian																		
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri		-		-	-	-	-	-	14%	65%	100%	8%	49%	-	-	-	-	-
	Pertumbuhan Industri		-		-	-	-	-	-	-16%	2,96%	0,66%	0,44%	-0,67%	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		-		-	-	-	-	-	2%	6%	-	9%	1%	-	-	-	-	-
	Jumlah Industri Pengolahan Skala Kecil		1		-	2	3	1	1	-	-	6	1	-	-	-	-	600%	100%
	Jumlah Industri Pengolahan Skala Menengah		1		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%	-	-	-
	Jumlah Sentra-produksi Sekunder		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Bantuan Peralatan TTG Untuk Sektor Industri Tertentu		15		15	15	15	15	15	3	8	-	45	1	20%	53,3%	-	300%	6,66%
	Persentase IKM Yang Dibina		100		150	130	120	120	100	170	130	130	136	126	113,33%	100%	108,33%	113,33%	126%

Tabel 2.3.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN																	
- Retribusi Surat Izin Usaha Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Retribusi Surat Izin Daftar Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20,000,000	184,988,784	20,002,740	-	-	138,468,850	97,083,719	26,002,740	-	-	692,34%	52,48%	130%	-	-		
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
- Gaji dan Tunjangan	830,826,469	1,279,154,168	939,374,416	1,025,988,525	1,282,253,322	799,927,060	1,148,901,413	924,208,901	1,042,692,497	1,240,843,996	96,28%	89,82%	98,39%	101,63%	96,77%		
- Tambahan Penghasilan PNS	448,680,000	409,200,000	436,800,000	451,800,000	461,530,000	310,907,951	302,704,386	354,064,231	402,616,702	443,829,452	69,29%	73,97%	81,06	89,11%	96,16%		
BELANJA LANGSUNG																	

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	Anggar an	Realisa si	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,300,00 0	2,614,0 00	-	-	-	2,047,000	2,363,00 0	-	-	-	89%	90,40%	-	-	-		
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	57,754,0 00	52,200, 000	48,600,0 00	49,800,0 00	47,160,0 00	19,407,86 6	23,042,8 78	30,636,9 98	43,545,1 25	34,945,1 33	33,60 %	44,14%	63,04%	87,44%	74,10 %		
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,629,7 00	2,933,7 00	-	-	-	26,561,50 0	2,932,00 0	-	-	-	99,74 %	99,94%	-	-	-		
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25,000,0 00	25,000, 000	7,500,00 0	13,000,0 00	15,000,0 00	24,766,00 0	24,850,0 00	7,488,00 0	12,520,0 00	11,145,0 00	99,06 %	99,40%	99,84%	96,31%	74,30 %		
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	28,977,5 00	18,986, 000	1,000,00 0	2,000,00 0	2,000,00 0	27,495,00 0	18,147,0 00	185,000	1,465,00 0	1,299,00 0	94,88 %	95,58%	18,50%	73,25%	64,95 %		
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151,565, 000	121,00 0,000	-	-	-	122,977,0 00	118,490, 000	-	-	-	81,14 %	97,93%	-	-	-		
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,740,00 0	5,700,0 00	5,640,00 0	5,880,00 0	4,680,00 0	2,520,000	5,175,00 0	4,740,00 0	5,440,00 0	4,560,00 0	53,16 %	90,79%	84,04%	92,52%	97,44 %		

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	349,650,500	306,676,000	233,435,000	248,480,000	275,300,000	345,507,800	299,968,100	233,175,000	247,689,900	274,384,031	98,82%	97,81%	99,89%	99,68%	99,67%		
- Penyediaan Jasa Administrasi/Tenaga Teknis	54,000,000	144,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	51,000,000	115,000,000	90,000,000	90,000,000	85,500,000	94,44%	79,86%	100%	100%	95%		
- Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD	91,022,000	106,863,000	171,812,500	166,000,750	107,521,750	89,700,800	97,047,600	153,801,301	149,576,050	95,868,450	98,55%	90,81%	89,52%	90,11%	89,16%		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
- Pembangunan Gedung Kantor	588,275,058	-	-	-	-	544,936,748	-	-	-	-	92,63%	-	-	-	-		
- Pengadaan Mebeulair	154,460,000	42,109,000	-	-	-	154,040,000	41,254,000	-	-	-	99,73%	97,97%	-	-	-		
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55,300,000	85,000,000	12,500,000	77,500,000	10,000,000	55,007,500	45,462,450	8,394,400	42,580,500	4,674,000	99,47%	53,49%	91,57%	54,94%	46,74%		
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24,000,000	28,500,000	17,119,000	21,000,000	26,450,000	19,610,320	18,382,900	15,739,600	16,586,000	18,976,970	81,71%	64,50%	91,94%	78,98%	71,75%		

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	2,000,000	2,000,000	500,000	-	-	1,995,000	1,900,000	492,000	-	-	99,75 %	95%	98,40%	-	-		
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	32,000,000	30,992,500	-	-	-	32,000,000	30,992,500	-	-	-	100%	100%		
- Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Operasional	-	-	-	29,900,000	-	-	-	-	29,900,000		-	-	-	100%	-		
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	-	161,900,000	-	-	-	-	151,971,000	-	-	-	-	93,87 %		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	18,000,000	-	-	-	-	15,180,000	-	-	-	-	84,33 %	-	-	-	-		
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	8,600,000	-	-	-	-	8,600,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	6,300,000	-	-	-	-	6,300,000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,000,000	100,000,000	50,000,000	55,000,000	40,000,000	50,080,000	92,133,200	41,664,000	37,352,500	30,836,300	83,47%	92,13%	83,33%	67,91%	77,09%		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	4,196,000	-	-	-	-	8,392,000	-	-	-	-	51,24%	-	-	-		
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF																	
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35,920,000	34,715,000	-	25,731,000	23,731,000	35,694,500	33,597,000	-	25,699,600	23,402,500	99,37%	96,78%	-	99,88%	98,62%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH																	

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Peningkatan Kerjasama di Bidang HAKI	214,545,000	89,765,000	-	38,315,000	122,802,400	101,714,000	6,362,400	-	4,355,000	74,070,700	47,41%	7,09%	-	11,37%	60,32%		
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan																	
• (Teknologi Diversifikasi Pengolahan Ikan)	130,960,000	-	-	-	-	31,904,000	-	-	-	-	30,874,000	-	-	-	96,77%		
• Bimtek Pengelolaan Simpan Pinjam																	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH																	

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	323,184,000	234,438,000	225,285,000	227,335,000	361,900,000	63,557,000	164,879,000	219,638,700	164,015,000	262,226,800	19,67%	70,33%	97,49%	72,15%	72,46%		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI																	
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	13,570,000	20,910,000	-	-	-	11,236,300	16,473,500	-	-	-	82,80%	78,78%	-	-	-		
- Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	36,480,000	47,150,000	-	-	-	36,434,500	37,788,000	-	-	-	99,98%	80,14%	-	-	-		

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN																	
Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Fasilitas Penyelesaian Permasalahan- permasalahan Pengaduan Konsumen	126,901, 000	242,52 5,000	196,688, 000	228,884, 000	242,334, 000	122,287,7 50	223,013, 079	194,218, 636	224,135, 490	237,895, 500	96,36 %	91,95%	98,71%	97,93%	98,17 %		
- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	27,558,0 00	52,671, 000	-	31,241,0 00	22,796,0 00	9,946,000	30,558,0 00	-	26,592,0 00	11,448,8 00	36,09 %	58,02%	-	85,12%	50,22 %		
- Operasionalisasi Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	16,364,0 00	21,422, 500	-	9,071,00 0	12,048,0 00	15,432,70 0	20,486,0 00	-	7,443,00 0	7,561,40 0	94,31 %	95,63%	-	82,05%	62,76 %		

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI																	
Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	42,834,00 0	49,65 5,000	27,672,00 0	23,405, 000	22,856,0 00	40,039,50 0	41,577,0 00	26,390,0 00	21,685,000	14,71 5,000	93,46 %	83,73%	95,37%	92,65%	64,38 %		
- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	5,403,438, 800	6,797, 015,1 80	7,594,252, 400	6,781,8 08,513	8,601,85 9,600	4,241,330, 130	6,180,04 9,247	6,834,70 9,065	5,550,903,7 27	6,447, 295,1 22	78,49 %	90,92%	90%	81,85%	75,83 %		
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	39,545,00 0	45,42 5,000	-	-	39,385,0 00	39,425,60 0	37,738,0 00	-	-	37,73 8,000	99,70 %	83,08%	-	-	95,96 %		
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22,717,50 0	33,98 1,500	-	-	19,583,0 00	21,317,50 0	18,430,5 00	-	-	17,16 5,000	93,84 %	54,24%	-	-	87,65 %		
- Bimbingan Teknis Operasionalisasi dan Fungsionalisasi Gudang Dalam Kerangka Sistem Resi Gudang	-	-	-	-	29,657,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH																	

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

- Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	646,344,000	575,600,000	123,521,000	119,663,500	-	116,005,000	444,710,000	66,449,700	86,469,500	-	17,95%	77,26%	53,80%	72,26%	-		
Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	78,121,500	192,320,000	-	-	151,147,000	51,816,000	123,741,500	-	-	140,008,000	66,33%	64,34%	-	-	92,63%		
• Pelatihan Handycraft Lanjutan																	
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32,377,000	39,207,000	-	-	29,868,500	32,197,500	37,491,500	-	-	26,635,000	99,45%	95,62%	-	-	95,47%		
- Fasilitas Bagi Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	227,249,500	268,139,000	-	-	-	146,192,000	97,128,550	-	-	-	64,33%	36,22%	-	-	-		
• Pelatihan Teknis Pembuatan Bubuk Cokelat dan Cokelat																	

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

- Fasilitas Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	215,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Rumput Laut																	
Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Fasilitas Industri Kecil Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	79,651,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Sagu																	
- Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-	490,000,000	-	-	-	-	489,412,000	-	-	-	-	99,88 %		
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI																	
- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	327,132,500	299,289,000	-	-	-	24,800,000	299,289,000	-	-	-	7,58%	100%	-	-	-		
• Pengadaan																	

Peralatan Pengolahan Kelapa																	
- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	81,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Uraian	Anggaran SKPD Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI																	
- Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	-	44,900,000	-	217,850,000	-	-	44,900,000	-	207,645,000	-	-	100%	-	95,32%	-		
- Pengembangan Kawasan Home Industri (KHILAN)	-	-	-	197,522,500	-	-	-	-	178,163,960	-	-	-	-	90,20%	-		
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL																	
- Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	47,735,000	26,950,000	20,203,500	28,419,500	34,780,900	24,517,000	25,662,000	2,455,000	26,515,000	28,601,300	51,36%	95,22%	86,41%	93,30%	82,23%		

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja SKPD telah disusun Sistem Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

1. SOP Penerimaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.
3. SOP Pengelolaan Surat Tugas
4. SOP Pengarsipan Surat
5. SOP Penyediaan ATK dan Pelaporan Persediaan
6. SOP Pemeliharaan Gedung Kantor
7. SOP Pencatatan dan Pelaporan BMD
8. SOP Pengajuan SPD
9. SOP Pembayaran Gaji ASN
10. SOP Pengajuan SPP
11. SOP Pengajuan SPM
12. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
13. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
14. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
15. SOP Penyusunan Renstra
16. SOP Penyusunan Renja
17. SOP Pembuatan RKA
18. SOP Pembuatan LAKIP
19. SOP Penyusunan Laporan
20. SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja
21. SOP Pembuatan KP4
22. SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
23. SOP Permohonan Cuti
24. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
25. SOP Pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
26. SOP Permohonan Pensiun Pegawai

2. Bidang Perdagangan

27. SOP Penertiban Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Permohonan Baru)

28.SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Perpanjangan)

29.SOP Pembuatan Jurnal Harga

30.SOP Penyajian Bahan Pengolahan dan Penyajian Data Potensi Perdagangan

31.SOP Tera dan Tera Ulang UTTP

3. Bidang Koperasi

32.SOP Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

33.SOP Pengusulan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

34.SOP Penandatanganan Rekomendasi Pembuatan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

35.SOP Pengusulan Bantuan Permodalan Bagi Koperasi

36.SOP Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

37.SOP Pengawasan Koperasi

4. Bidang UMKM

38.SOP Pendataan UKM

39.SOP Pembuatan Profil UKM

40.SOP Fasilitasi Pendaftaran HAKI

41.SOP Pengusulan Bantuan Permodalan Bagi Wirausaha Pemula

4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Rencana Strategis (Strategik) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur harus menganalisa dua faktor yaitu tantangan (*Stenghts*) dan peluang (*Opportunities*) yang dihadapi melalui sektor koperasi dan umkm, perindustrian dan perdagangan. Untuk menganalisa kedua faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan tantangan (*Stenghts*) dan peluang (*Opportunities*). Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi dan umkm, dan perdagangan Kabupaten Luwu Timur sendiri

2.4.1 Analisa SWOT Perdagangan

Analisa tantangan (*Stenghts*) dan peluang (*Oppurtunities*) sektor Perdagangan antara lain :

Tantangan

1. Kemampuan aparatur tidak merata.
2. Jumlah pegawai yang masih belum memadai.
3. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai.
4. Data perdagangan yang belum akurat.
5. Anggaran pembinaan yang masih terbatas.
6. Belum adanya SDM Panera dan Penyidik (PPNS) Perlindungan Konsumen.
7. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi.
8. Belum adanya UPTD Kemetrolagian Legal.
9. Kualitas SDM para pelaku usaha relatif masih rendah.
10. Persaingan usaha yang semakin ketat.
11. Adanya globalisasi perdagangan .
12. Persaingan usaha yang semakin ketat.

Peluang

1. Adanya Tupoksi dan program kerja bidang Perdagangan yang jelas, terarah dan baku.
2. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stokholders yang terkait.
3. Adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar dari pimpinan/kepala dinas

4. Adanya program diklat-diklat teknis.
5. Kemauan para dunia usaha/pelaku usaha yang tinggi untuk berkembang.
6. Adanya agenda promosi produk/pameran baik skala lokal maupun nasional.

2.4.2 Analisa SWOT Koperasi dan UMKM

Analisa tantangan (Stenghts) dan peluang (Oppurtunities), sektor Koperasi dan UMKM antara lain :

Tantangan

1. Terbatasnya petugas yang menangani Koperasi dan UMKM.
2. Akses teknologi KUKM menggunakan teknologi sederhana dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
3. Akses masyarakat/UMKM ke sektor permodalan, teknologi, bahan baku dan pasar masih rendah.
4. Kualitas produk belum berdaya saing.
5. Sulitnya UMKM dalam mengakses pemasaran.
6. Masih lemahnya sistem manajemen pada Koperasi dan UMKM.
7. Masih rendahnya SDM pengusaha/pengrajin dan pengurus koperasi
8. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi.
9. Belum optimalnya kualitas pelayanan di sektor Koperasi dan UMKM.
10. Belum memiliki standar pelayanan minimal (SPM) untuk kegiatan bidang Koperasi dan UMKM.
11. Terbukanya akses pasar produk berbagai Negara dengan adanya perdagangan bebas.
12. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Luwu Timur dengan kualitas teknologi yang lebih baik.
13. Pesaingan bisnis yang tidak sehat antar gerakan koperasi.

Peluang

1. Potensi Koperasi dan UMKM dari segi kuantitatif cukup besar.
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Berkembangnya produk unggulan daerah.
4. Adanya Dekopinda, Dekranasda sebagai wadah penyalur aspirasi.
5. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu Timur.
6. Komitmen dan konsistensi untuk terus memperbaiki iklim usaha di Kabupaten Luwu Timur.
7. Adanya visi, misi dan program unggulan Kabupaten Luwu Timur yang mendukung pengembangan UMKM.
8. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang koperasi dan umkm yang bersifat normatif maupun finansial dalam pelaksanaan program pengembangan di daerah.
9. Tersedianya fasilitasi dan dukungan bagi UMKM dengan menyediakan sarana dan prasarana promosi melalui penyelenggaraan pameran promosi.
10. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar.
11. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan pangsa pasar yang semakin terbuka.
12. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi UMKM.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan data keadaan perkembangan bidang perdagangan, koperasi, dan umkm maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Bidang Perdagangan

Permasalahan Bidang Perdagangan yang ditemui antara lain :

1. Lokasi yang sempit dan terbatas di kecamatan- kecamatan sehingga menyulitkan dalam pengembangan sarana perdagangan;
2. Sulitnya pengembangan omzet karena belum memadainya sarana dan prasarana pendukung di setiap sarana perdagangan;
3. Kesesuaian master plan dengan dokumen lingkungan sarana perdagangan (AMDAL dan atau UPL-UKL) terutama penanganan limbah dan tata ruang sarana perdagangan;
4. Kebiasaan pelaku pasar yang kurang memperhatikan kenyamanan pembeli;
5. Kurangnya edukasi terhadap pelaku atau pengelola sarana perdagangan tentang tata cara pengelolaan yang baik;
6. Kurangnya kesadaran pelaku ekonomi dalam mengurus/memperpanjang izin-izin usaha yang dibutuhkan untuk memulai usaha walaupun sudah dilakukan simplifikasi;
7. Adanya anggapan bahwa stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting hanya urusan perdagangan;
8. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam memulai suatu usaha perdagangan;
9. Ketersediaan sumber daya untuk melakukan pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang masih terbatas;

10. Koordinasi lintas SKPD dan TPID mulai dari pusat-daerah yang belum optimal;
11. Pelaksanaan operasi pasar untuk stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tidak maksimal dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan;
12. Pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi (mis, BBM, pupuk dan pestisida, LPG 3 Kg) belum terjangkau dengan baik;
13. Tingkat kesadaran pelaku ekonomi yang masih rendah dalam menggunakan alat-alat yang bertera dan terstandar;
14. Pelaksanaan promosi dagang, pameran nasional dan internasional dan misi dagang belum dapat dilakukan karena keterbatasan pada sumber daya dan informasi yang tersedia;
15. Belum ada tenaga teknis untuk pelaksanaan tera ulang;
16. Belum ada sarana laboratorium dan alat-alat kelengkapannya untuk pelaksanaan tera ulang;
17. Belum ada PPNS pengawasan dan perlindungan konsumen.

b. Bidang Koperasi dan UMKM

Permasalahan Koperasi dan UMKM yang ditemui antara lain :

1. Rendahnya pemahaman para pengelola, pengurus, maupun anggota koperasi terhadap kelembagaan koperasi;
2. Kapasitas dan kualitas SDM para pengurus Koperasi yang masih sangat minim dan terbatas;
3. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif.
4. Rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM;
5. Sektor Koperasi dan UMKM yang belum memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas;
6. Sebagian besar produk UMKM masih menggunakan alat tradisional dalam pengembangan produk;
7. Bunga pinjaman yang masih terlalu tinggi;
8. Masih minimnya jumlah Koperasi yang sehat dan berperstasi;

9. UMKM dalam menjalankan usahanya tidak berdasarkan sistem manajemen kewirausahaan yang semestinya;
10. Minimnya aparat bidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu Timur;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah “**Luwu Timur Terkemuka 2021**” artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya. Sedangkan misinya diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya;
2. Mendorong peningkatan investasi daerah;
3. Memanfaatkan ruang sesuai engan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah;
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mendukung 4 (empat) misi yaitu :

Misi I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya	Tujuan : Meningkatkan produksi sektor-sektor perekonomian, kualitas kesejahteraan sosial, dan apresiasi kebudayaan daerah
Misi VI : Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan : Memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik

Tabel 3.2.1

Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 terkait Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Misi I			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi sektor-sektor perekonomian, kualitas kesejahteraan sosial, dan apresiasi kebudayaan daerah	Meningkatnya produksi bidang-bidang usaha perekonomian	Mendukung ketersediaan sarana produksi, inovasi teknologi dan kelembagaan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, KUMKM dan pariwisata	1. Peningkatan kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha dan dukungan sarana dan prasarana produksi 2. Pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri
Misi VI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong reformasi dengan fokus pada perbaikan pengelolaan keuangan dan asset,	1. Perencanaan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, penerapan e-government dan

		keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas ASN	administrasi pemerintahan 2. Peningkatan kualitas SDM-ASN dan kapasitas kelembagaan birokrasi
--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian K/L dan Renstra Propinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perdagangan telah menetapkan visi yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***

Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

• Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu ***“Terdepan Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan”***.

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Menumbuhkan wirausaha baru Industri Mikro, yang berbasis pedesaan dan urban perkotaan serta Industri Kecil berbasis Perguruan Tinggi/SMK;

2. Menumbuhkan Industri Menengah di 24 Kabupaten/Kota, berdasarkan kompetensi inti industri daerah;
3. Meningkatkan daya saing, melalui penguatan inovasi dan difusi teknologi disepanjang rantai nilai (value chain), khususnya produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mengendalikan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat;
5. Meningkatkan kinerja ekspor dan pengendalian impor serta membuka hubungan kerjasama perdagangan internasional;
6. Mewujudkan penerapan metrologi legal, guna terciptanya kepastian hukum dan perlindungan baik konsumen maupun produsen;
7. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha, melalui layanan informasi dan konsultasi secara terpadu;
8. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel.

b. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan kebudayaan.

- **Telaahan Rensta Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan**

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri);
2. Meingkatkan jumlah produk baru yang telah mendapatkan perizinan;
3. Meningkatnya jumlah wirausaha baru;
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif;
5. Meningkatnya jumlah koperasi skala besar;
6. Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha besar;
7. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah;
8. Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang terfasilitasi diklat;
9. Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses lembaga keuangan;
10. Meningkatnya fungsi pelayanan dan pengelolaan serta pemeliharaan asset daerah;
11. Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah;
12. Meningkatnya sistem perencanaan evaluasi kinerja SKPD.

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Luwu Timur

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Pertanian;

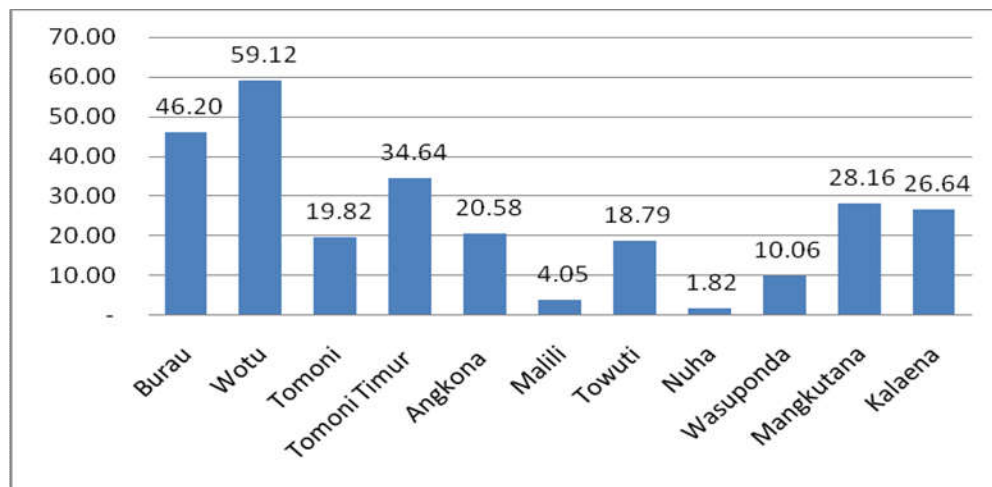
Kabupaten luwu timur masih mengandalkan Sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat. Dengan melihat struktur perekonomian daerah dimana pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB secara agregat sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 57,08% jika sektor pertambangan dan penggalian tidak dimasukkan dalam hitungan. Potensi ketersediaan lahan masih luas, dimana kepadatan penduduk yang ada masih rendah sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan kegiatan perekonomian hal ini sejalan dengan visi kabupaten pengembangan Agroindustri. peruntukan kawasan pertanian diarahkan pada :

1. Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti;
2. Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
3. Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
4. Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Penggunaan tanah pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan kering. Lahan Sawah di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 seluas 25.509 Ha yang terdiri dari: 23.867 Ha yang menggunakan irigasi, 1.478 Ha merupakan sawah tadah hujan dan pasang surut 164 Ha.

Sementara itu, lahan kering di Kabupaten Luwu Timur diantaranya digunakan untuk berbagai keperluan. Sebanyak 31.286 Ha digunakan sebagai tegal/kebun, 12.743 Ha untuk ladang/huma, 34.827 Ha untuk perkebunan, 2.951 Ha untuk hutan rakyat dan 3.145 Ha untuk tanah gembala/padang rumput.

Rata-rata produksi/produktivitas padi (padi sawah dan ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 sebesar 71,18 kuintal/hektar dengan luas panen sebesar 37.908 Ha dan produksi 269.842,10 ton. Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan Wotu dengan total produksi 59.124,10 ton dari luas panen sebesar 6.529 Ha.



Gambar 3.4
Grafik Produksi Padi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 (ribuan ton)

Selain padi, komoditi tanaman pangan dan palawija yang dihasilkan Kabupaten Luwu Timur adalah: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. adapun nilai produksi yang dihasilkan komoditi tersebut di tahun 2014, yakni: produksi jagung sebanyak 22.684,53 ton dari luas panen 3.960 Ha, produksi kedelai sebesar 64,31 ton dari luas panen 50 Ha, produksi kacang tanah sebesar 43,07 ton dari 32 Ha luas panen, produksi kacang hijau sebesar

5,92 ton dari 7 Ha luas panen sedangkan ubi kayu dan ubi jalar mencapai produksi masing-masing 1.421,75 ton dan 673,33 ton. Kabupaten Luwu Timur, ditunjang dengan kondisi alamnya yang subur, merupakan salah satu daerah utama penghasil komoditi perkebunan, meliputi: kelapa, kelapa sawit, kakao dan lada. Pada tahun 2014, produksi tanaman perkebunan rakyat terbanyak adalah kelapa sawit, yaitu sebesar 81.120,80 ton yang diperoleh dari luas lahan seluas 10.482,81 Ha. Produksi terbanyak yang kedua adalah komoditi kakao, yakni sebesar 11.895,77 ton dari lahan seluas 27.821,49 Ha. Produksi kakao terbesar berada di Kecamatan Burau sebesar 3.560,27 ton dengan luas lahan 6.677,18 Ha sedangkan produksi kelapa sawit terbanyak berada di Kecamatan Angkona sebesar 22.507,50 ton. Di kabupaten ini juga terdapat salah satu pabrik penghasil minyak sawit yang dikelola oleh PTPN XIV.

b. Kawasan Perindustrian

Pengembangan industri di Kabupaten Luwu Timur tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Dalam struktur perekonomian kabupaten Kontribusinya terhadap pembentukan PDRB adhk (DT) kabupaten menempati urutan ketiga hanya sebesar 1,97 persen sedangkan jika sektor pertambangan dan penggalian tidak dimasukkan dalam hitungan sektor ini mampu memberikan *share* sebesar 6,93 persen setelah sektor Jasa-jasa dan pertanian. Melihat kondisi diatas pemerintah kabupaten terus berupaya untuk pengembangan sektor ini sehingga mampu meningkatkan share sektor ini. Pembentukan sektor industri pengolahan ini terbesar dari sub sektor makanan dan minuman hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan industri di kabupaten Luwu Timur sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah dan industri rumah tangga. Pengembangan kawasan ini diarahkan pada :

1. Kawasan industri kecil dan menengah di Desa Harapan Kecamatan Malili; dan
2. Industri rumah tangga berupa industri kerajinan tersebar di semua kecamatan.

c. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Berdasarkan RTRW kabupaten pengembangan kawasan ini diarahkan pada :

1. Kawasan perdagangan skala kabupaten meliputi: kawasan perdagangan PKL Malili, kawasan perdagangan PPK Sorowako, dan PKLp Wotu; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh kecamatan.

Selain potensi pengembangan kawasan diatas jika dikaitkan dengan fungsi strategis wilayah berdasarkan struktur dan pola ruang kawasan prioritas yang akan dikembangkan :

1. **Kawasan Strategis Nasional (KSN);**

Kawasan Strategis Nasional dimaksud adalah kawasan Strategis yang ditetapkan dalam RTRWN, adalah KSN Sorowako Lingkup kegiatan KSN Sorowako, adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

2. **Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Kawasan Strategis Provinsidimaksud adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di kabupaten Luwu Timur meliputi:

- a. Kawasan Lumbung Beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena;
- b. Kawasan Pengembangan Jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau;
- c. Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan;
- d. Kawasan Tambang Nikel di Sorowako;
- e. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona;
- f. Kawasan Cagar Alam Faruhumpenai, Cagar Alam Kalaena, Taman Wisata Alam Danau Matano, Taman Wisata Alam Danau Mahalona, Taman Wisata Alam Danau Towuti.

3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);

Pengembangan kawasan strategis kabupaten ditinjau dari sudut pengembangan perekonomian terdiri atas:

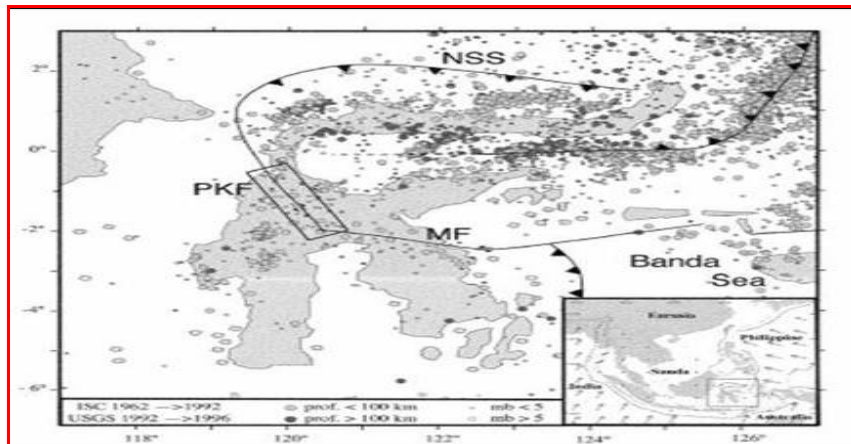
- a. Kawasan pemerintahan; diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada kecamatan Malili.
- b. Kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan Pemerintahan dan Perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan yang terdiri atas :
 1. Kawasan perkotaan Tomoni;
 2. Kawasan perkotaan Burau;
 3. Kawasan perkotaan Wonorejo;
 4. Kawasan perkotaan Kalaena;
 5. Kawasan perkotaan Kertoharjo;
 6. Kawasan perkotaan Solo;
 7. Kawasan perkotaan Wawondula; dan
 8. Kawasan perkotaan Wasuponda.
- c. kawasan agropolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan tanaman hutan rakyat pengembangannya diarahkan pada wilayah :
 1. Kecamatan Burau dengan komoditi unggulan meliputi padi sawah, durian, rambutan, kakao, kelapa sawit, sagu, lada, sapi, unggas, sengan dan jabon;
 2. Kecamatan Wotu dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, kedelai, durian, manggis, rambutan, kakao, kelapa sawit, sapi, sengan dan jabon;
 3. Kecamatan Tomoni dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, kakao, kelapa sawit, lada, sapi dan unggas;
 4. Kecamatan Tomoni Timur dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sapi dan unggas;

5. Kecamatan Mangkutana dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, sorgum, kenaf, kakao, kelapa sawit, sagu, sapi, unggas, sengon dan jabon;
6. Kecamatan Kalaena dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sorgum, kenaf, kakao, unggas, sengon dan jabon;
7. Kecamatan Angkona dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, jagung, kakao, kelapa sawit, sagu, dan sapi;
8. Kecamatan Malili dengan komoditas unggulan meliputi durian, rambutan, kakao, kelapa sawit, sagu, lada, sengon dan jabon;
9. Kecamatan Wasuponda dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, jagung, sayur-sayuran, kakao, kelapa sawit, sagu, sapi, sengon dan jabon;
10. Kecamatan Towuti dengan komoditas unggulan meliputi padi sawah, sayur-sayuran, lada, kakao, kelapa sawit, sutera alam, sengon dan jabon; dan
11. Kecamatan Nuha dengan komoditas unggulan meliputi lada, kakao, tanaman hias, unggas, sengon dan jabon

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya.

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Adapaun arahan rencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

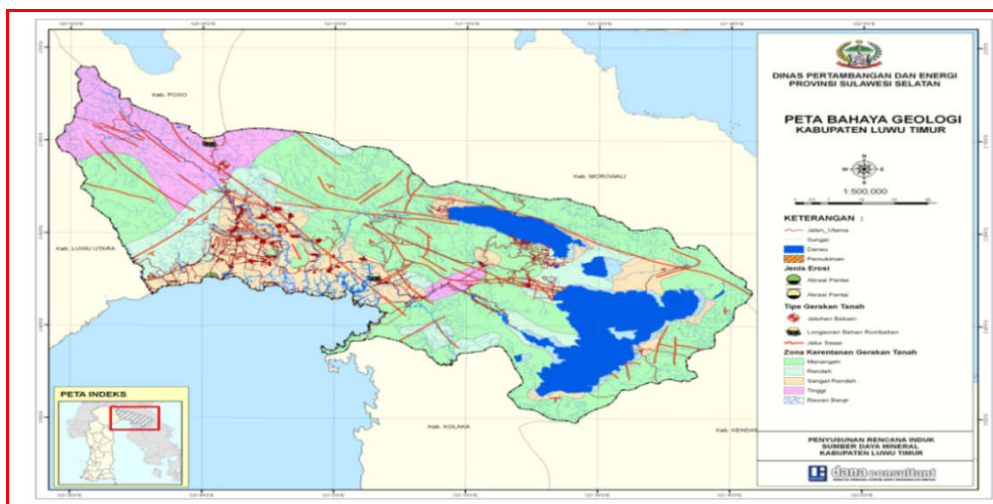
1. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
2. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
3. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha



Gambar. 2.7
Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

Dari Peta bahaya geologi diketahui bahwa zona kerentanan menengah mendominasi daerah ini, yang menyebar dibagian tengah dan timur serta sedikit dibagian barat wilayah Luwu Timur, dengan total luasan 320.299 Ha. Kemudian zona kerentanan sangat rendah yang meyebar dibagian selatan

pada daerah dataran pantai atau pada dataran banjir dekat muara sungai dengan sebaran mencapai 105.4450 Ha. Zona kerentanan ini dijumpai dibagian barat laut disekitar Mangkutana dan pada sekitar jalur antara Malili – Soroako. Selaian dipengaruhi oleh Litologi dan struktur geologi yang cukup intens, dan juga dipengaruhi oleh lerengan yang cukup tinggi didaerah ini, dengan total luasan zona tinggi berkisar 84.600 Ha. Untuk lebih jelasnya luasan dan letak wilayah Zona kerentanan Bahaya Geologi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.8

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hal yang dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur bidang perdagangan, koperasi, UKM Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak ekonomi disuatu wilayah dan meningkatkan

kesejahteraan anggota. Permasalahan yang dihadapi disektor perkoperasian masih terbatasnya kemampuan SDM dalam hal pengelolaan koperasi, masih terbatasnya kemampuan pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akuntansi, ketidakpatuhan koperasi aktif dalam pelaksanaan RAT, masih minimnya koperasi dalam kategori sehat.

2. Permasalahan bidang usaha kecil dan menengah secara umum adalah masih kurangnya ukm yang memperoleh sertifikasi HAKI, keterbatasan akses KUR/ permodalan dari perbankan, jaringan pemasaran yang terbatas,
3. Permasalahan bidang perdagangan yang dihadapi Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi kurangnya SDM Penera dan Penyidik PNS (PPNS) perlindungan Konsumen, terbatasnya sarana perdagangan/distribusi perdagangan. Belum adanya UPTD Metrologi legal dalam pelayanan tera dan tera ulang. Masih kurangnya pasar yang tertib ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur (DTU) yang mempersiapkan data base perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), banyaknya pasar yang dibangun tidak berfungsi secara optimal . Belum adanya perda pengelolaan pasar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Memperkuat kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Peningkatan pencapaian kinerja urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan
3. Mewujudkan kinerja pelayanan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

4.2 Sasaran

Sasaran di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Peningkatannya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM
2. Peningkatannya pendapatan sektor usaha perdagangan
3. Peningkatannya akuntabilitas kinerja pelayanan

Sehingga tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Menguatkan Kelembagaan Koperasi dan UKM	- Persentase koperasi sehat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM	- Persentase koperasi aktif	58,82 %	59,97 %	60,28 %	60,98 %	61,64 %	61,64 %
		- Pertumbuhan UKM yang telah mandiri		- Persentase jumlah UKM yang telah mandiri	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
2.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pendapatan sektor usaha perdagangan	- Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal	75%	80%	15%	19%	23%	23%
				- Ekspor bersih perdagangan	650 Juta US\$	670 Juta US\$	680 Juta US\$	690 Juta US\$	700 Juta US\$	700 Juta US\$
3.	Mewujudkan kinerja pelayanan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Prestasi LAKIP berdasarkan Opini Inspektorat	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	- Prestasi nilai AKIP	60	60	60	60	60	60

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategis dan arah kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 s/d Tahun 2021

VISI : Luwu Timur Terkemuka 2021

MISI 1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya dan Didukung oleh Stabilitas Keamanan Wilayah dan Nilai-Nilai Budaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menguatkan kelembagaan koperasi dan UKM	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses permodalan koperasi dan UKM dengan mengoptimalkan potensi lembaga keuangan mikro, meningkatkan pemasaran dan perlindungan UKM melalui event promosi dan pemasaran hasil UKM - Mengembangkan kelembagaan dan usaha perkoperasian melalui pengembangan usaha dan kemitraan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses permodalan usaha dan pemasaran produk UKM - Pengembangan kelembagaan koperasi dan perluasan usaha koperasi - Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi UKM untuk memperluas kesempatan kerja
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya pendapatan sektor usaha perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman tentang legalitas usaha dan kemampuan manajemen usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, bimbingan

		<p>perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sinergitas stakeholders terkait perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan pasar rakyat - Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar melalui pengembangan infrastruktur dan revitalisasi pasar rakyat - Meningkatkan kerjasama dengan SKPD bidang perekonomian - Efektifitas TPID tingkat kabupaten - Mengoptimal kan pengawasan dan monitoring ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat - Meningkatkan kegiatan monitoring dan pengawasan peredaran barang dan jasa yang diperdagang kan - Meningkatkan kerjasama dengan SKPD propinsi, kementerian perdagangan dan stakeholders lain terkait pengembangan produk ekspor skala daerah - Meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan tentang pentingnya UTPP 	<p>teknis dan kunjungan lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas sarana prasarana pasar melalui pembangunan infrastruktur dan revitalisasi pasar rakyat - Peningkatan fasilitas pendukung pasar guna terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib dan indah - Peningkatan manajemen pengelolaan pasar rakyat - Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder bidang perekonomian dan TPID - Peningkatan pengawasan dan monitoring ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat secara berkala dan pemantauan terhadap fluktuasi harga - Peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan peredaran
--	--	--	--

			<p>barang dan jasa yang diperdagangkan, alat ukur timbang dan perlengkapannya, label harga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi bagi produk ekspor skala daerah yang unggul dan berdaya saing - Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perdagangan
Misi VI Mendorong Reformasi Birokrasi Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
TUJUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Mewujudkan kinerja pelayanan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan prasarana publik di sektor koperasi, perdagangan, usaha kecil dan menengah - Meningkatkan evaluasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui diklat dan bimtek sesuai bidang tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor koperasi dan umkm, perdagangan - Peningkatan evaluasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui diklat dan bimtek sesuai bidang tugasnya

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1 Program**

Program pembangunan dan pengembangan Perdagangan, Koperasi, UKM yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
14. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

6.2 Kegiatan

Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Penyediaan jasa tenaga administrasi/tenaga teknis
15. Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD
16. Monitoring dan evaluasi
17. Kunjungan kerja dalam daerah
18. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
20. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
21. Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir
22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
25. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
26. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
27. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
29. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
30. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
31. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
32. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
33. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
34. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
35. Pendampingan HAKI bagi usaha kecil menengah

36. Pengembangan dan pemutakhiran data usaha kecil menengah
37. Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah
38. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
39. Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
40. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
41. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
42. Pelatihan audit bagi pengawas koperasi
43. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
44. Bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
45. Pelatihan manajer koperasi
46. Falitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
47. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
48. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
49. Optimalisasi operasi pasar
50. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
51. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
52. Pengembangan data base informasi potensi unggulan
53. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
54. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
55. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2016-2021

Visi LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021

Renstra :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Menguatkan kelembagaan koperasi dan UKM	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UKM	Persentase jumlah UKM yang telah mandiri (%)				10	10		10		10		10		10				Disdag kop-UKM	
			Persentase koperasi aktif (%)				58.82	58.82		59.97		60.28		60.98		61.64					
				15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase wirausaha UKM yang baru (%)	0	0	54,348,000	5.83	151,595,000	4.37	226,565,000	4.37	495,000,000	5.83	505,000,000	20.4	1,432,508,000	Disdag kop-UKM	
					Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang telah terdata (UKM)	0	0	-	3000	58,315,000	4000	69,895,000	0	-	0	-	7000	128,210,000	Disdag kop-UKM	

					Facilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah dokumen renstra UKM untuk pengembangan usaha (dokumen)	0	0	-	1	8,415,000	0	-	0	-	0	-	1	8,415,000	Disdag kop-UKM	
					Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Jumlah KUKM yang terfasilitasi label halal, desain produk dan merek dagang (UKM)	7	7	54,348,000	10	84,865,000	21	156,670,000	0	-	0	-	36	295,883,000	Disdag kop-UKM	
					Pengembangan dan Pemutakhiran Data Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang telah terdata (UKM)	0	0	-	0	-	0	-	4000	75,000,000	3000	75,000,000	7000	150,000,000	Disdag kop-UKM	
					Pendampingan HAKI bagi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah KUKM yang terfasilitasi label halal, desain produk dan merek dagang (UKM)	0	0	-	0	-	0	-	25	170,000,000	35	180,000,000	60	350,000,000	Disdag kop-UKM	
					Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk UKM yang dipromosikan (produk)	0	0	-	0	-	0	-	8	250,000,000	8	250,000,000	16	500,000,000	Disdag kop-UKM	

				16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang ditingkatkan kelas kemampuan lembaganya dari pemula ke lanjutan (responsif gender) (UKM)	10	10	92,97 1,000	40	425, 570, 000	20	256,18 4,500	20	200, 000, 000	20	205,000, 000	110	1,179,7 25,500	Disdag kop- UKM	
					Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM yang dilatih (responsif gender) (UKM)	50	50	92,97 1,000	200	320, 605, 000	100	147,81 7,500	100	160, 000, 000	100	160,000, 000	550	881,39 3,500	Disdag kop- UKM	
					Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi (koperasi)	0	0	-	10	78,4 93,0 00	15	80,565 ,000	0	-	0	-	25	159,05 8,000	Disdag kop- UKM	
					Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi HAKI (UKM)	0	0	-	25	26,4 72,0 00	30	27,802 ,000	35	40,0 00,0 00	37	45,000,0 00	127	139,27 4,000	Disdag kop- UKM	
				17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase investasi dan kemitraan dengan Perbankan/ LKM (%)	6.13	6.13	252,0 66,00 0	3.3	405, 255, 000	4.1	225,73 5,000	0	-	0	-	13.53	883,05 6,000	Disdag kop- UKM	
					Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapat pengawasan terhadap penggunaan dana KUR (UKM)	0	0	-	100	20,0 60,0 00	125	15,995 ,000	0	-	0	-	225	36,055, 000	Disdag kop- UKM	

					Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk UKM yang dipromosikan (produk)		5	252,066,000	6	385,195,000	6	209,740,000	0	-	0	-	17	847,001,000	Disdag kop-UKM	
				18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat statusnya dari kurang sehat menjadi sehat (%)	22,92	22,92	118,959,000	24,65	83,085,000	25,88	151,360,000	28,17	367,395,000	28,17	376,850,000	28,17	1,097,649,000	Disdag kop-UKM	
					Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dibangun (koperasi)	53	53	23,232,000	81	32,095,000	120	78,620,000	156	80,000,000	156	85,000,000	115	298,947,000	Disdag kop-UKM	
					Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi (koperasi)	0	0	-	0	-	0	-	15	85,000,000	15	85,000,000	30	170,000,000	Disdag kop-UKM	
					Pelatihan Audit bagi Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti pelatihan audit (koperasi)	21	21	95,727,000	10	50,990,000	15	72,740,000	15	75,000,000	15	75,000,000	76	369,457,000	Disdag kop-UKM	
					Bimbingan Teknis Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi KSP/USP yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan koperasi (koperasi)	0	0	-	0	-	0	-	10	51,300,000	12	53,550,000	22	104,850,000	Disdag kop-UKM	

					Pelatihan Manajer Koperasi	Jumlah manajer koperasi yang mengikuti pelatihan (koperasi)	0	0	-	0	-	0	-	30	76,0 95,0 00	30	78,300,0 00	60	154,39 5,000	Disdag kop- UKM	
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Meningkatnya pendapatan sektor usaha perdagangan	Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal (%)				75	75		80		15		19		23				Disdag kop- UKM	
			Ekspor bersih perdagangan (Juta US\$)				650	650		670		680		690		700				Disdag kop- UKM	
				15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pengaduan konsumen dan tertib niaga yang ditindaklanjuti (%)	100	100	302,4 82,10 0	100	373, 885, 000	100	1,501, 155,20 0	100	545, 000, 000	100	575,000, 000	100	3,297,5 22,300	Disdag kop- UKM	
					Fasilitasi penyelesaian permasalahan-pemmasalahan pengaduan konsumen	Jumlah paket pasar murah yang tersalurkan (paket)	3200	3200	264,7 85,00 0	3300	291, 819, 000	3400	348,47 0,000	0	-	0	-	9900	905,07 4,000	Disdag kop- UKM	
					Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Persentase temuan pengawasan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	23,28 4,000	100	39,3 35,0 00	100	33,770 ,000	100	45,0 00,0 00	100	45,000,0 00	100	186,38 9,000	Disdag kop- UKM	
					Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolologi an Daerah	Persentase alat UTP yang akurat (%)	0	0	14,41 3,100	80	42,7 31,0 00	85	1,118, 915,20 0	90	60,0 00,0 00	95	65,000,0 00	95	1,301,0 59,300	Disdag kop- UKM	

					Optimalisasi Operasi Pasar	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar (RTM)	0	0	-	0	-	0	-	3500	360,000,000	3600	380,000,000	7100	740,000,000	Disdag kop-UKM	
					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah informasi jurnal harga dari kecamatan (jurnal)	0	0	-	0	-	0	-	132	80,000,000	132	85,000,000	264	165,000,000	Disdag kop-UKM	
				17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase produk yang diekspor dan atau diperdagangkan antar pulau (%)	0	0	-	60	121,890,000	70	48,230,000	85	100,000,000	90	100,000,000	90	370,120,000	Disdag kop-UKM	
					Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Jumlah pelaku usaha yang mengetahui prosedur dan dokumen kegiatan ekspor/ impor (badan usaha)	0	0	-	50	98,600,000	0	-	25	50,000,000	25	50,000,000	100	198,600,000	Disdag kop-UKM	
					Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Jumlah buku produk potensi unggulan daerah (buku)	0	0	-	20	23,290,000	20	48,230,000	20	50,000,000	20	50,000,000	80	171,520,000	Disdag kop-UKM	
				18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan (%)	80	80	8,031,148,100	90	4,875,508,500	100	9,445,945,950	100	9,283,989,635	100	9,397,298,079	100	41,033,890,264	Disdag kop-UKM	
					Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah buku standarisasi harga (buku)	124	124	30,378,000	124	37,933,000	124	32,407,000	0	-	0	-	372	100,718,000	Disdag kop-UKM	

					Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	Jumlah pasar rakyat yang dibangun (pasar)	6	6	7,952,065,700	3	4,763,987,500	4	9,335,485,950	5	9,283,989,635	5	9,397,298,079	23	40,732,826,864	Disdag kop-UKM	
					Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi jurnal harga dari kecamatan (jurnal)	132	132	48,704,400	132	73,588,000	132	78,053,000	0	-	0	-	396	200,345,400	Disdag kop-UKM	
				19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase gerobak dan perlengkapannya yang dimanfaatkan (%)	0	0	-	80	30,000,000	0	-	0	-	0	-	80	30,000,000	Disdag kop-UKM	
					Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Persentase gerobak dan perlengkapannya yang dimanfaatkan (%)	0	0	-	80	30,000,000	0	-	0	-	0	-	80	30,000,000	Disdag kop-UKM	
	Mewujudkan Kinerja Pelayanan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Prestasi nilai AKIP (Nilai)				60	60		60		60		60		60				Disdag kop-UKM	
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	99	99	596,956,000	99	843,966,000	99	698,580,000	99	779,845,000	99	805,615,000	99	3,724,962,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	0	0	-	0	-	0	-	1900	800,000	1900	800,000	3800	1,600,000	Disdag kop-UKM	

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (rekening)	6	6	44,400,000	6	70,800,000	5	60,000,000	5	66,000,000	5	66,000,000	5	307,200,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)	0	0	-	5	44,990,000	5	54,920,000	0	-	0	-	5	99,910,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang diadakan(jenis) (jenis)	26	26	3,140,000	26	27,300,000	26	27,379,000	26	27,400,000	26	27,500,000	3930	112,719,000	Disdag kop-UKM	
						Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)	0	0		2		2		2		2		2		Disdag kop-UKM	
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	71	71	15,575,000	71	16,000,000	71	16,400,000	71	16,900,000	71	17,400,000	355	82,275,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	0	0	-	0	-	0	-	40	30,000,000	40	30,000,000	80	60,000,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia (lembar)	0	0	-	0	-	0	-	21000	11,000,000	21000	11,000,000	42000	22,000,000	Disdag kop-UKM	
						Jumlah bahan jilid yang tersedia (exemplar)	0	0		0		0		300		300		600		Disdag kop-UKM	
						Jumlah bahan cetakan yang	0	0		0		0		3		3		6		Disdag kop-UKM	

					tersedia (jenis)																
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (unit)	10	10	2.500,000	10	2,500,000	10	2.500,000	10	2,900,000	10	3,000,000	50	13,400,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia (exemplar)	1380	1680	6,060,000	1680	6,060,000	1680	6,240,000	1680	6,240,000	1680	6,240,000	8400	30,840,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM genset yang disediakan (liter)	0	0	-	0	-	0	-	50	375,000	50	375,000	100	750,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (kotak)	0	0	-	0	-	0	-	600	12,000,000	600	12,000,000	1200	24,000,000	Disdag kop-UKM	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	81	61	229,762,000	61	405,180,000	61	281,030,000	61	381,030,000	61	400,000,000	305	1,697,002,000	Disdag kop-UKM	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang terbayarkan (orang)	6	6	108,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	90,000,000	6	468,000,000	Disdag kop-UKM	

					Penyediaan penunjang administrasi kesekretaria tan SKPD	Persentase terpenuhi nya penunjang administrasi kesekretaria tan SKPD (%)	100	100	102,409,000	100	48,625,000	100	40,000,000	0	-	0	-	100	191,034,000	Disdag kop-UKM	
					Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen)	1	1	85,110,000	1	101,731,000	4	60,126,000	4	75,000,000	4	80,000,000	14	401,967,000	Disdag kop-UKM	
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	0	0	-	90	30,780,000	245	59,985,000	245	60,200,000	245	61,300,000	825	212,265,000	Disdag kop-UKM	
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	99	99	225,938,450	99	351,017,000	99	158,860,000	99	1,012,000,000	99	1,017,000,000	99	2,764,815,450	Disdag kop-UKM	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	0	0	-	1	17,442,000	2	43,860,000	1	400,000,000	1	400,000,000	5	861,302,000	Disdag kop-UKM	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	0	0	-	5	150,800,000	0	-	0	-	0	-	5	150,800,000	Disdag kop-UKM	
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	19	19	159,053,450	18	101,600,000	6	34,000,000	9	60,000,000	10	65,000,000	62	419,653,450	Disdag kop-UKM	

					Pembangun an Taman, Lapangan/ Fasilitas Parkir	Cakupan luas lapangan/fa silitas parkir yang terbangun (%)	0	0	-	0	-	0	-	60	216, 000, 000	60	216,000, 000	60	432,00 0,000	Disdag kop- UKM	
					Pemelihara an rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang didipelihara (Unit)	4	4	18,75 0,000	4	39,9 75,0 00	4	25,000 ,000	3	50,0 00,0 00	3	50,000,0 00	4	183,72 5,000	Disdag kop- UKM	
					Pemelihara an rutin/ berkala kendaraan dinas/opera sional	Jumlah kendaraan dinas/opera sional yang dipelihara (Unit)	8	8	40,64 0,000	8	41,2 00,0 00	8	56,000 ,000	8	70,0 00,0 00	8	70,000,0 00	8	277,84 0,000	Disdag kop- UKM	
					Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Cakupan luas gedung kantor yang direhab (%)		30	7,495, 000	0	-	0	-	70	216, 000, 000	70	216,000, 000		439,49 5,000	Disdag kop- UKM	
				3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatk an pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	100	100	16,04 0,000	100	-	100	7,250, 000	100	30,0 00,0 00	100	20,000,0 00	100	73,290, 000	Disdag kop- UKM	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap annya	Jumlah aparatur yang mendapat kan pakaian dinas (orang)	0	29	16,04 0,000	0	-	0	-	30	30,0 00,0 00	0	-	30	46,040, 000	Disdag kop- UKM	
					Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapat kan pakaian hari-hari tertentu (orang)	0	0	-	0	-	29	7,250, 000	0	-	30	20,000,0 00	30	27,250, 000	Disdag kop- UKM	

				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas nya (orang)	10	10	63,00 0,000	10	65,0 00,0 00	10	150,47 5,000	10	70,0 00,0 00	10	75,000,0 00	50	423,47 5,000	Disdag kop-UKM	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (orang)	10	10	63,00 0,000	10	65,0 00,0 00	10	150,47 5,000	10	70,0 00,0 00	10	75,000,0 00	50	423,47 5,000	Disdag kop-UKM	
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	0	0	-	99	3,68 5,00 0	99	9,000, 000	99	9,00 0,00 0	99	9,000,00 0	99	30,685, 000	Disdag kop-UKM	
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen ikhtisar perencanaan yang disusun (dokumen)	0	0	-	0	-	4	5,000, 000	0	-	0	-	4	5,000,0 00	Disdag kop-UKM	
					Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)	0	0	-	1	3,68 5,00 0	1	4,000, 000	1	4,00 0,00 0	1	4,000,00 0	4	15,685, 000	Disdag kop-UKM	
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	3	5,00 0,00 0	3	5,000,00 0	6	10,000, 000	Disdag kop-UKM	

				6	Program Perencana an dan Penganggar an SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaa n dan penganggar an SKPD yang disusun tepat waktu (%)	0	0	-	99	10,0 00,0 00	99	10,000 ,000	99	10,0 00,0 00	99	10,000,0 00	99	40,000, 000	Disdag kop- UKM	
					Penyusunan Dokumen Perencana an dan Penganggar an SKPD	Jumlah dokumen perencana an dan penganggar an yang disusun (dokumen)	0	0	-	3	10,0 00,0 00	3	10,000 ,000	3	10,0 00,0 00	3	10,000,0 00	12	40,000, 000	Disdag kop- UKM	
	TOTAL								9,753, 908,6 50		7,74 0,45 6,50 0		12,889 ,340,6 50		12,9 02,2 29,6 35		13,095,7 63,079		56,381, 698,51 4		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN****7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD, didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial ekonomi seperti laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, indeks gizi, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dll.
2. Aspek pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial antara lain tingkat kemandapan jalan propinsi, kondisi jaringan irigasi propinsi, rasio elektrifikasi rumah tangga, tingkat pelayanan air bersih perkotaan, tingkat pelayanan persampahan di perkotaan, tingkat pelayanan air limbah diperkotaan, capaian luas kawasan lindung, angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, persentase balita gizi buruk, angka partisipasi kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, rata-rata lama sekolah, dll.

3. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, industri dan perdagangan termasuk dalam aspek indikator kinerja yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan bidang perdagangan, koperasi dan UKM :

Tabel. 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	TARGET RPJMD 2016-2021					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1	Persentase koperasi aktif	58,82%	59,97%	60,28%	60,98%	61,64%	61,64%	61,64%
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	-	-	-	-	-	-	-
15.3	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	2	2	2
15.4	Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah	10%	20%	30%	40%	50%	50%	50%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
6.	Perdagangan							
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	650 juta US\$	650 Juta US\$	670 Juta US\$	680 Juta US\$	690 Juta US\$	700 Juta US\$	700 Juta US\$
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	75%	80%	15%	19%	23%	23%	23%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 ini dibuat dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja lima tahunan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan menjaga sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Program dan Kegiatan serta merupakan dokumen perencanaan taktis, strategis dinas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman kepada visi dan misi Kepala dan Wakil Daerah terpilih tertuang pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021.

Dokumen ini berisi program, kegiatan, alokasi dana indikatif yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, pagu indikatif sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja ini bisa memberikan dorongan motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera

Malili, 8 April 2019

KEPALA DINAS,



